

***THE INFLUENCE OF INTERNAL AUDIT AND HUMAN RESOURCE
COMPETENCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF THE LOCAL
GOVERNMENT IN CENTRAL JAVA (2018-2022)***

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH (TAHUN 2018-2022)**

Bunga Mentari¹⁾, Lintang Kurniawati²⁾*

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2)}

b200200269@student.ums.ac.id¹⁾, lk123@ums.ac.id²⁾*

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of internal audit and human resource competence on the quality of financial reports of the local government in Central Java. This research is quantitative, with a population consisting of Regional Work Units (SKPD) of the Central Java Local Government, including Financial Administration Officers (PPK), Technical Activity Executing Officers (PPTK), Revenue Treasurers, and Expenditure Treasurers. The sample was selected using purposive sampling, comprising 108 respondents from 27 SKPDs, specifically from the accounting/financial administration sections. Primary data were collected through a questionnaire survey, and the analysis was conducted using multiple linear regression techniques. The results show that simultaneously, internal audit and human resource competence affect the quality of local government financial reports. However, partially, internal audit does not have a positive and significant effect, while human resource competence has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: Internal Audit, Human Resource Competence, Quality of Local Government Financial Reports, Central Java

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh audit internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan populasi terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, mencakup 108 responden dari 27 SKPD, yang terdiri dari bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Data primer dikumpulkan melalui survei kuesioner, dan analisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, audit internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, secara parsial, audit internal tidak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Audit Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Menurut Halim (2012:20), keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk

melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang

terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan yang akuntansi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, hal ini didukung oleh teori stewardship (stewardship

theory). Teori *stewardship* menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen dan kesuksesan perusahaan, jika kesuksesan perusahaan tercapai maka hal itu meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Selain itu, kesuksesan pemerintah/organisasi juga akan ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan kepuasan manajemen dengan memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Mahmudi (2016:2) menyatakan bahwa salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka peningkatan perekonomian suatu daerah, salah satu yang harus dicapai adalah kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan. (Apridianti, 2017).

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Namun, kinerja keuangan pemerintah daerah masih dipandang rendah, hal ini senada dengan yang dikatakan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota regional III di Gedung JEC, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin 6 Februari 2017. Penyerahan LHE AKIP Regional III Indonesia, terdiri dari 156 kabupaten/kota se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Dari 156 kabupaten/kota tersebut tidak ada Kabupaten/kota yang mendapatkan nilai memuaskan atau AA. Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, keseriusan dan komitmen Bupati, Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta pimpinan daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

Sangat penting melakukan pengukuran kinerja keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika melakukan pengelolaan keuangan daerah, Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan dalam menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan, yaitu untuk kepentingan publik, efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Kecerahan dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2012).

Rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia masih menjadi perhatian kalangan akademisi dan praktisi. Udayanti dan Ariyanto (2014) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), buruknya sistem pengendalian intern serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf menentukan kualitas LKPD. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester II tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan lemahnya sistem pengendalian intern. Terdapat 100 kasus kelemahan sistem pengendalian intern Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan beberapa masalah antara lain pencatatan belum akurat (46 kasus), Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak lengkap (18 kasus) dan lain-lain kelemahan SPI (36 kasus).

Otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian LKPD (Cherina, 2018). Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi terhadap manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Upaya pemerintah untuk mengetahui apakah LKPD yang disajikan telah diungkapkan dengan wajar dan berkualitas, setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK kemudian mengeluarkan opini yang merupakan hasil penilaian atas kualitas LKPD. Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tertinggi yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan berkualitas adalah opini WTP. Opini WTP terhadap laporan keuangan dapat menaikkan tingkat keyakinan yang tinggi untuk mempercayai informasi LKPD.

Pentingnya Audit Internal dalam suatu instansi membuat timbulnya hal-hal yang harus dilakukan oleh Audit Internal. Audit internal pun harus bebas dari hambatan dalam menjalankan tugasnya. Tugas dari audit internal adalah untuk membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal perusahaan, termasuk pengendalian atas penjualan, membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab, dan pendapat yang objektif mengenai kegiatan yang telah diperiksa. The institute of international auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness

of risk management, control and governance processes". (IIA (the Institute of Internal Audit ,1999).

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak maupun dalam pelaksanaan audit.

Audit internal, sebagaimana dijelaskan oleh Sukrisno Agoes (2013:203), adalah pemeriksaan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi, dan ketaatan terhadap kebijakan manajemen serta peraturan pemerintah. Di Indonesia, fungsi audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang mengawasi tugas dan fungsi organisasi. Faktor penting yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah kompetensi sumber daya manusia, yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menyusun laporan keuangan secara efisien dan efektif (Ratmono, 2019). Sumber daya manusia yang kompeten, dengan pengalaman dan pendidikan yang memadai, diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang baik dan relevan (Azhar, 2010). APIP, khususnya Inspektorat Kabupaten/Kota, melakukan reviu atas LKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 untuk memastikan keandalan informasi sebelum disampaikan kepada pihak terkait, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Fenomena Kualitas Laporan Keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seiring dengan

perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas informasi laporan keuangan pemerintah (Faturey, 2023). Fenomena yang terjadi di pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, salah satunya yaitu (Pemkab) Sragen telah meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Raihan WTP ini didapatkan dari penilaian BPK Perwakilan Jateng terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen secara konsisten selama empat (7) tahun berturut-turut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya seperti (Ratmono, 2019; Tambingon dkk., 2018; Anggriawan dan Yudianto, 2018; Sudiarianti, 2015), Ristra Utami Budiyanoto (2019) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD salah satunya yaitu sistem pengendalian audit intern.

Dari fenomena-fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Sragen medapat opini wajar tanpa pengecualian menurut BPK. Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan

pemerintah. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Maka, peranan audit internal sangat penting.

Fenomena masih tingginya tingkat temuan oleh BPK sebagai auditor eksternal namun tidak ditemukan oleh APIP sebagai auditor internal menjadi alasan penelitian ini penting dilakukan, banyaknya kasus hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi yang menyeret dan melibatkan pejabat pemerintah daerah yang mengindikasikan masih lemahnya pengawasan APIP, masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP dan pentingnya peran APIP dalam hal ini auditor pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Sisa temuan yang tidak tertindak lanjuti karena adanya proses yang panjang seperti temuan keuangan contoh hibah bansos ataupun temuan administrasi seperti tidak terselesaikan sertifikat tanah-tanah pemerintah yang sudah dibebaskan. Wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang baru berkembang sehingga tingkat penguasaan pengetahuan auditor dalam menggali temuan masih tergolong lemah, dibandingkan auditor di daerah lain yg lebih berpengalaman.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Kualitas Internal Audit yang dilakukan akan berhubungan dengan kompetensi dan obyektivitas dari staf Internal Audit pada perusahaan tersebut. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar (Hiro Tugiman, 2019), beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan Pengaruh Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan,

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Teguh Erawati, 2019) yang berjudul “pengaruh peran internal audit, pemahaman tentang PP no 71 tahun 2010, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan” hasil penelitian tersebut audit internal, pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, terdapat pada objek penelitiannya dan penelitian ini menambahkan variabel sumber daya manusia, alasan peneliti menambahkan variabel sumber daya manusia dan menggunakan variabel komitmen organisasi sebagai variabel intervening kemudian melakukan replikasi karena peneliti merasa itu penting dilakukan di pemerintahan Jawa Tengah dan untuk memastikan bahwa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu konsisten. Penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Daerah Yogyakarta, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas, yaitu Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi yang berkaitan dengan audit internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengenali faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dan memenuhi

transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Berbagai teori yang mendasari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*) *Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *Stewardship Theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal, terutama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber daya di pemerintah daerah.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh

pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lainr.

3. Audit Internal

Definisi mengenai Audit Internal menurut Hery (2017:238) sebagai berikut: “Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”. Menurut *The Institute of Internal Auditors* (2017: 29) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, menyatakan bahwa: “*Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization*”. (Audit Internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi).

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut (Zuliatri, 2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi dilihat sebagai

kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif.

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.” Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan: “Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”.

6. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Pengertian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Menurut Indra Bastian (2010:9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.” Suatu Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik antara lain relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (lihat Ratmono dan Sutrisno, 2019).

Berdasarkan penjelasan dari dasar teori yang digunakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu faktor penting dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada suatu entitas adalah pengawasan intern. Sebagai komponen pengendalian intern, pengawasan intern berfungsi menilai secara objektif dan independen penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota di Instansi Pemerintah (Djalil, 2014). oleh Erfiansyah (2018) dengan objek penelitian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Atas penelitian tersebut disimpulkan bahwa auditor internal berperan positif dan signifikan atas terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Irafah (2020) dengan objek penelitian seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Sumatera utara juga menyimpulkan hal yang sama

bahwa Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.. Berdasarkan uraian di atas hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Audit internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah kompetensi sumber daya manusia. Pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah salah satu hal yang mendasar LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI dikarenakan langkanya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan merupakan faktor kunci terciptanya integritas keuangan. SDM yang berkualitas dan berpengalaman dapat memahami logika akuntansi dengan baik, sehingga dapat dihasilkan integritas keuangan (Usman, Wirawan and Zulkifli, 2021).

Pemerintah harus memiliki SDM yang berkompeten dengan akademik yang berlatar belakang ilmu akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) terkait ilmu akuntansi, dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi. Kompetensi SDM mempunyai peranan yang sangat krusial dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan yang diatur pada “PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah” yang dijadikan dimensi dari variabel “kualitas laporan keuangan SKPD yang

terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.” SDM dengan terpenuhinya karakteristik kompeten akan dapat mempengaruhi kualitas LKPD menjadi meningkat sehingga LKPD dapat sesuai dengan karakteristik kualitatifnya dan hasil pemeriksaan dari BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan penelitian Putriasri Pujanira, dan Abdullah Taman (2022 dari hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebanyak 108 responden dari 27 SKPD Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Sampel pada penelitian ini adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer, dikumpulkan diperoleh melalui survei hasil kuesioner. Analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Rumus model ekonometrika yang digunakan sebagai berikut :

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 AU + \beta_2 KSDM + e$$

Keterangan:

KLKPD = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

AU = Audit Internal

KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

α = Nilai intersep (konstan)

β = Koefisien

e = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan cara survey dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah karyawan pada departemen keuangan di Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Pemilihan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data yang telah dipilih untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis Deskriptif

a. Karakteristik Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Karakteristik responden yang ikut serta dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden digunakan untuk mengetahui keterlibatan gender dalam proses pembuatan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Jenis

kelamin yakni salah satu kategori dasar dalam kehidupan sosial (Saputri, 2021).

Jenis kelamin merupakan salah satu karakteristik yang penting untuk dipertimbangkan terhadap kinerja, salah satunya adalah dalam melakukan Menyusun laporan keuangan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	48	38,3%
Perempuan	60	61,7%
Total	108	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah 2024

Karakteristik jenis kelamin responden terdiri dari dua kategori. Kategori pertama laki-laki dan kedua adalah perempuan. Dari tabel 1, 108 data yang dikumpulkan, kategori terbanyak adalah perempuan dengan jumlah 60 orang (61,7%) dan laki-laki berjumlah 48 orang (38,3%). Berdasarkan hasil ini, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang ikut serta dalam penelitian ini, yaitu staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah adalah berjenis kelamin perempuan.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik biografis umur menunjukkan bahwa umur pegawai dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Umur responden dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengalaman dalam menyusun laporan keuangan atau posisi jabatan di Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Karakteristik responden berdasarkan umur yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Presentase
Di bawah 30 tahun	26	13,3%
30-40 tahun	44	48,3%
Di atas 40 tahun	38	38,3%
Total	108	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah 2024

Karakteristik responden berdasarkan umur terdiri dari tiga kategori. Pertama, umur di bawah 30 tahun, kedua, umur 30-40 tahun dan ketiga di atas 40 tahun. Dari tabel 2, 108 data yang dikumpulkan, responden yang berusia di bawah 30 tahun yaitu 26 orang (13,3%) dan responden yang berusia 30-40 tahun mempunyai frekuensi tertinggi yaitu 44 orang (48,3%). Kemudian responden yang berusia di atas 40 tahun berjumlah 38 orang (38,3%). Hasil ini menunjukkan bahwa umur responden pada penelitian ini, yaitu staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah di dominasi oleh umur 30-40 tahun.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden diharapkan dapat menggambarkan kemampuan yang dimiliki pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap (Tasmara, 1995: 4). Karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMP/ SMA dan sederajatnya	15	11,7%
DIPLOMA (D1, D2, D3)	26	10,0%
SARJANA (S1, S2)	67	78,3%
Total	108	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah 2024

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terdiri dari tiga kategori. Ketiga kategori tersebut adalah SMP/ SMA dan sederajatnya, Diploma, dan Sarjana. Dari tabel 3, 108 data yang

dikumpulkan, frekuensi tertinggi diperoleh dari responden dengan pendidikan Sarjana (S1, S2) yaitu 67 orang (78,3%). Responden dengan pendidikan Diploma sebanyak 26 orang (10,0%). Responden dengan pendidikan terakhir SMP/ SMA dan sederajatnya sebanyak 15 orang (11,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah mayoritas memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1, S2). Hasil ini juga menunjukkan adanya kualifikasi pendidikan untuk staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Presentase
Non Akuntansi	39	25,0%
Akuntansi	69	75,0%
Total	108	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri dari dua kategori. Kedua kategori tersebut adalah latar belakang pendidikan akuntansi dan non akuntansi. Dari tabel 4, 108 data yang dikumpulkan, frekuensi tertinggi diperoleh dari responden dengan latar belakang pendidikan akuntansi yaitu 69 orang (75,0%). Sedangkan, responden dengan latar belakang pendidikan non akuntansi sebanyak 39 orang (25,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini, staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang ditemukan dalam penelitian ini mayoritas memiliki latar belakang pendidikan akuntansi,

sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan untuk staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah diutamakan dari jurusan akuntansi. Latar belakang pendidikan relevan dengan pekerjaan staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

5) Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan
Karakteristik responden berdasarkan jabatan yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Bidang Akuntansi	6	1,7%
Kepala Bagian Keuangan	6	1,7%
Kepala Subbagian Perbendaharaan	7	3,3%
Kepala Subbagian Akuntansi	9	1,7%
Kepala Subbagian Keuangan	17	11,7%
Bendahara Penerimaan	19	20,0%
Bendahara Pengeluaran	44	60,0%
Total	108	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa staff keuangan dan akuntansi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah memiliki jabatan Kepala Bidang Akuntansi yaitu 6 orang (1,7%), Kepala Bagian Keuangan yaitu 6 orang (1,7%), Kepala Subbagian Perbendaharaan yaitu 7 orang (3,3%), Kepala Subbagian Akuntansi yaitu 9 orang (1,7%), Kepala Subbagian Keuangan yaitu 17 orang (11,7%), Bendahara Penerimaan yaitu 19 orang (20,0%), dan Bendahara Pengeluaran yaitu 44 (60,0%).

6) Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Karakteristik responden berdasarkan masa kerja yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Presentase
1-5 tahun	78	90,0%
6-10 tahun	30	10,0%
Total	108	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah 2024

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan

bahwa staff keuangan dan akuntansi yang bekerja di Pemerintah Daerah Jawa Tengah sebagian besar memiliki masa kerja yang paling banyak di rentang 1 – 5 tahun yaitu 78 orang (90,0 %). Selanjutnya di rentang 6 – 10 tahun yaitu 30 orang (10,0%).

b. Variabel Penelitian

Hasil analisis deskriptif pada masing-masing variabel penelitian ini, yaitu variabel independen Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel dependen (Y), yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
AU	108	15	20	19,28	1,406
KSDM	108	10	20	15,59	1,829
KLKPD	108	14	20	17,23	1,863

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa N merupakan jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 108 responden. Nilai minimum adalah nilai skor terendah, sedangkan nilai maksimum adalah nilai skor tertinggi, mean adalah rata-rata dari nilai maksimum dan nilai minimum, sedangkan standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Apabila tingkat standar deviasi semakin tinggi berarti jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin bervariasi (heterogenitas). Sebaliknya, apabila tingkat standar deviasi semakin rendah, berarti jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin homogeny atau variasi jawaban responden semakin kecil.

Berdasarkan tabel tersebut, deskripsi masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

Variabel Audit Internal sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel

audit internal sebesar 19,28. Nilai standar deviasi pada variabel audit internal sebesar 1,406 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 15,59. Nilai standar deviasi pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 1,829 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 17,23. Nilai standar deviasi pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1,863 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh antara Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Analisis regresi linier berganda, yaitu regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi dan Purwanto, 2020:508).

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Hasil uji F

Pada pengujian kelayakan atau uji F dalam penelitian ini menggunakan pengujian Anova. Hasil dari pengujian kelayakan ini dapat dilihat dari tabel

Tabel 8. Hasil Uji F

F	Sig	Keterangan
10,355	0,000	Model Penelitian Layak

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji anova pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai F signifikan sebesar 0,000. Dari hasil tersebut, dapat diketahui nilai F signifikan $0,000 < (\alpha)$ tingkat signifikansi 5%, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat memprediksi variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Dengan demikian, hasil dari uji Anova di atas menyatakan bahwa uji Anova sesuai dengan pernyataan yang ada dalam uji F menurut Ghozali (2018).

b. Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil uji koefisien determinasi (R²) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R-square	Adj R Square
0,406	0,165	1,149

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,165. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 16,5% sedangkan sisanya 83,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji T

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila arah koefisien sesuai dengan bunyi hipotesis dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima, dan jika salah satu keduanya tidak terpenuhi maka hipotesis ditolak atau tidak didukung. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Hasil Uji T

Model	B	t	Sig
(Constant)	13,227	4,418	0,000
AU	-0,106	-,880	0,381
KSDM	0,388	4,181	0,000

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji pada tabel 10 di atas, diketahui bahwa sig variabel Audit Internal menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,381 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis data melalui uji regresi linear berganda, maka dapat dibuat suatu persamaan baru yakni sebagai berikut:

$$Y = 13,227 - 0,106 X_1 + 0,388 X_2 + \varepsilon$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diartikan bahwa:

Nilai konstanta (α) memiliki nilai 13,227. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen konstan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 13,277 satuan.

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel audit internal adalah -0,106. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan audit internal sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan

akan menurun sebesar -0,106 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap. Berdasarkan hasil ini dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah kadang menghasilkan audit internal dengan rekomendasi untuk perbaikan, tetapi respon yang lambat dan kurang tepat dari pihak yang diaudit membuat pemeriksaan auditor internal menjadi kurang berarti.

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa koefisien dari variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 0,388. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kompetensi sumber daya manusia sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,388 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh antara penerapan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbukti. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel audit internal dengan signifikansi 0,381 (lihat tabel 4.17). Nilai signifikansi 0,381 lebih besar dari nilai kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis (H0) diterima dan (Ha1) ditolak. Artinya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh audit internal. Pemerintah daerah kadang menghasilkan audit internal dengan rekomendasi untuk perbaikan, tetapi respon yang lambat dan kurang tepat dari pihak yang diaudit membuat pemeriksaan auditor internal menjadi kurang berarti.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Diyah Atika, Listya Devi Junaidi, Allia Irmadhani (2019) dimana

audit internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Frasca Ardy Nugroho dan Widhy Setyowati (2019) meneliti tentang Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dari penelitian ini ditemukan peran audit internal memiliki pengaruh yang positif signifikan. Hal ini disebabkan masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait kelemahan peran internal audit. Dengan demikian H1 yang menyatakan audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditolak.

Pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Sutrisno (2016: 3), Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, bagaimanapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal, apabila tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu : pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai (Notoatmodjo, 2009: 3). Hal ini berarti bahwa Sumber Daya Manusia yang berkompeten akan mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Hasibuan (2016: 224) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari karya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Apabila kapasitas sumber daya

manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan akan memenuhi karakteristik kualitatif, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Tanjung 2012:13-15). Dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik, kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan, karena apabila kompetensi pembentuk laporan keuangan baik, maka dimungkinkan hasil kinerja yang dihasilkan juga baik.

Hasil hipotesis keempat (H2) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah terbukti. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dengan signifikansi 0,000 (lihat tabel 4.17). Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis (H0) ditolak dan (Ha4) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dimana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan. Temuan studi ini menunjukkan bahwasanya ketika departemen SDM terlatih dengan baik, lembaga pemerintah harus mengharapkan laporan keuangan berkualitas lebih tinggi.

Menurut Moehariono (2012: 5), Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang. Pendapat ini sesuai dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu pegawai memiliki cara berpikir, bersikap maupun bertindak tersendiri untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Willey (2002:3)

menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi organisasi. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan didukung oleh pengalaman/masa kerja responden pengelola keuangan yang sudah cukup lama di bidangnya serta seringnya responden mengikuti pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan daerah sehingga diduga dapat meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan. Dari data demografi lama kerja yang dominan sekitar 1-5 tahun (90,0%), sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dinilai dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya yang tertuang dalam deskripsi jabatan, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Tjiptoherijanto, 2001).

Dewi & Hoesada (2020) berpendapat kompetensi SDM merupakan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang berpengaruh langsung terhadap kinerja. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki SDM yang berkualitas dan berkompeten seperti pengetahuan, ketrampilan, dan sikap merupakan tiga aspek utama dalam kompetensi SDM. Pengelolaan keuangan akan berjalan dengan lancar apabila tiap-tiap aparatur pemerintah mempunyai kompetensi untuk mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah, sementara kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini menyarankan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan peran audit internal guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan kuesioner yang mudah dipahami oleh responden dan peneliti sebaiknya mendampingi langsung saat pengisian kuesioner. Penelitian lanjutan juga sebaiknya menambahkan metode survei langsung atau wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih akurat serta menambahkan variabel lain seperti penerapan standar akuntansi dan budaya organisasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. 2018. Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement of West Bandung District, West Java Province, Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 34.
- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal. 2012. *Audit kecurangan dan akuntansi forensic*. Harvarindo. Jakarta.
- Aditia Darma Nasution, Dito 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen*

- Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonom* 19 (4), 175-185.
- Arsyad Azhar. 2010. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Agung Gummla, Y. H. 2013. *Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Di Kap Di Kota Padang Dan Pekanbaru)*.
- Amin Widjaja Tunggal, 2012, *Audit kecurangan dan akuntansi forensik*, Harvarindo, Jakarta.
- Bastian, Indra. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- DiMaggio, P. J dan W. W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum*. *The Academy of Management Journal*.
- Dodopo, Yoki, dkk. 2017. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol. 8 (1).
- Fakhri Triasa Anggriawan dan Ivan Yudianto. 2018. *Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement*. *Journal of Accounting and Business*. Vol. 1 No.1. (diakses sabtu 13 April 2021 / 22.03).
- Hery. 2017. *Auditing dan Asurans*. Jakarta. Grasindo.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Penerbit : Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irham adam, M .2020. *Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Serta Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Peserta Diklat Pim III dan IV Tahun 2018-2019 Kabupaten Bondowoso)*. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kaunang, Alfred F. 2013. *Pedoman Audit Internal*. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta
- Lusi Novita Sari.2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)*. *Journal of Accounting and Business (Online)*. Vol 2, No 2 (2014). (diakses sabtu 8 mei 2021 / 12.03).
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manullang, 2016, *Dasar_Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press. P.O.BOX 14, Bulaksumur, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.

- Nainggolan, T. 2011. Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Sosial pada Pengguna Napza: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi. *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 16. No. 02 (161-174).
- Nova, Wati Sri. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 (1).
- Purwanti, Meilani dan Wasman Wasman. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Sensi*.
- Panglinan, Desi. 2020. Analysis Of Factors Affecting The Quality Of Regional Government Financial Statements North Toraja District. *Global Scientific Journals*. Volume 8, Issue 8, August 2020.
- Rezaee, Zabihollah. 2002. *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. New York : John Wiley and Sons, Inc.
- Ratmono. Dwi, & Sholihin. Mahfud. 2019. "Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua". Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yogyakarta. Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh Saleh. 2017. Pengaruh Kompetensi, Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu. *E Jurnal Katalogis*, Vol 5 No. 12. Universitas Tadulako.
- Suherman, Ade. Yuyun Susanti. 2017. Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survey Pada Rsud Kota Banjar). Kota Banjar.
- Sudiarianti, Ni Made. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 18*. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo, Winarni dan Hartanto, 201), "Aplikasi Six Sigma DMAIC Dan Kaizen sebagai metode pengendalian dan perbaikan kualitas produk" *Teknologi*, vol. 4, 2011.
- Tugiman, Hiro. 2014. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Kanisius: Yogyakarta.
- Yamali, Rozi Fakhru. 2017. "Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap Komitmen Organisasi Serta Implikasinya Pada Kinerja Tenaga Ahli Perusahaan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi". *Jurnal of Economic and Business. Ekonomi*: Vol. 1 No. 1 September 2017, Hal 213-222.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Jurnal Fakultas Ekonomi.Universitas Muh Muria Kudus.

Zeyn Elvira.2008. Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN:2008-0685 Vol.1 No.1 april 2011Pp 21-37

Peraturan pemerintah dan undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

<http://bpk.go.id> (diakses 22 Februari 2021 / 10.00).